

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abdul Kadir Muhammad, 1994, *Hukum Harta Kekayaan*, Cetakan I, Bandung : Citra Aditya Bakti.

Adrian Sutedi, 2009, *Tinjauan Hukum Pertanahan*, Jakarta : Pradnya Paramita.

A.P. Parlindungan, 2009, *Pendaftaran Tanah Di Indonesia*, Bandung : CV. Mandar Maju.

Bambang Sunggono, 2002, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Boedi Harsono, 2008, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksananya*, Jakarta : Djamban.

Effendi Perangin, 2011, *Hukum Waris*, Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada.

Habib Adjie, 2008, *Pembuktian Sebagai Ahli Waris Dengan Akta Notaris*, Bandung : CV. Mandar Maju.

Lawrence M. Friedman, 1996, *Teori dan Filsafat Umum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Mochtar Kusumaatmadja, B. Arief Sidharta, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Bandung : Alumni.

Moch. Setia Boedhi, 2006, *Buku Saku Pelayanan Pertanahan*, Bogor.

Peter Mahmud Marzuki. 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana.

Rianto Adi, 2004, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta : Garanit.

Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta : Liberty.

Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, 2005, *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, Jakarta : Prenada Media Group.

Urip Santoso, 2011, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

C. INTERNET

Proses Warisan”. <http://id.shvoong.com/social-sciences/sociology/2026243-proses-warisan/>,
diakses tanggal 29 Mei 2019, pukul 16.00 WIB.

Asriman, “Contoh dan Cara Menghitung BPHTB pada Tanah Warisan”,
<http://asriman.com/contoh-dan-cara-menghitung-bphtb-pada-tanah-warisan/>,
diakses Jum’at, 16 Agustus 2019, pukul 15.30 WIB

D. Wawancara

Putri Ayub Rukiah, *Wawancara*, Notaris/PPAT Kota Medan, Jalan Bukit Barisan Dalam
Nomor 8 EF Medan, tanggal 15 Agustus 2019

